

SKRIPSI

**EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PEMBELAJARAN
BERBASIS *DARING* PADA MASA PANDEMI *COVID 19*
DI BULUKUMBA**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2024

SKRIPSI
EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PEMBELAJARAN
BERBASIS *DARING* PADA MASA PANDEMI *COVID 19*
DI BULUKUMBA

Sebagai salah satu syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP)



Disusun dan Diajukan Oleh:

Andi Agung Triyatma

105641100217

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2024

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Evaluasi kebijakan publik dalam pembelajaran berbasis
daring pada masa pandemi *covid 19* di bulukumba

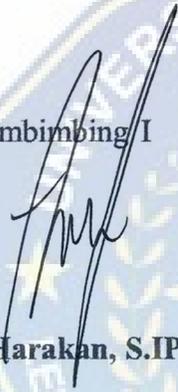
Nama Mahasiswa : Andi Agung Triyatma

Nomor Induk Mahasiswa : 105641100217

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui:

Pembimbing I



Ahmad Harakan, S.IP.,M.H.I

Pembimbing II



Nursaleh Hartaman, S.IP.,M.IP

Mengetahui:

Dekan Fisipol Unismuh Makassar

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM. 730727


Ahmad Harakan, S.IP.,M.H.I
NBM.1207163



HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar dengan nomor : 0257/FSP/A.4-II/V/45/2024 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dengan memperoleh gelar sarjana dalam program Studi Ilmu Pemerintahan yang dilaksanakan di Makassar pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2024.

Mengetahui:

Ketua

Sekretaris



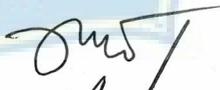
Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM. 730727



Dr. Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si
NBM. 992797

Tim Penguji

1. Dr. H. Amir Muhiddin, M.Si

()

2. Ahmad Harakan, S.IP.,M.H.I

()

3. Nursaleh Hartaman, S.IP.,M.IP

()

HALAMAN PERNYATAAN

Yang Bertandatangan Dibawah Ini

Nama : Andi Agung Triyatma

Nomor induk mahasiswa : 105641100217

Program studi : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul “ Evaluasi Kebijakan Publik Dalam Pembelajaran Berbasis *Daring* Pada Masa Pandemi *Covid 19* Di Bulukumba” adalah sepenuhnya karya ilmiah saya sendiri. Tidak ada bagian di dalamnya yang merupakan plagiat dari karya orang lain, tidak melakukan penciplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya ilmiah ini atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya ini

Makassar 21 Maret 2024
Yang menyatakan

Andi Agung Triyatma

ABSTRAK

ANDI AGUNG TRIYATMA. 2024 EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PEMBELAJARAN BERBASIS *DARING* PADA MASA PANDEMI *COVID 19* DI BULUKUMBA (Dibimbing oleh Ahmad Harakan dan Nursaleh Hartaman).

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui kebijakan publik dan hal yang menghambat dalam menjalankan kebijakan publik di kabupaten Bulukumba.

Tipe penelitian yang digunakan adalah penedekatan studi kasus yaitu peneliti melakukan pengumpulan data dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yaitu Reduksi data, Penyajian data, dan Penarikan kesimpulan. Pengabsahan data yang digunakan adalah Triangulasi sumber, Triangulasi teknik, dan Triangulasi waktu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Evaluasi kebijakan publik dalam pembelajaran berbasis *daring* di kabupaten Bulukumba melalui 3 indikator yaitu: 1). Evaluasi Formal adanya pemantau untuk menilai keberlangsungan penerapan pembelajaran *daring* yang telah di edarkan dengan melalui dokumen untuk memperkuat penetapan. 2). Evaluasi Semu adanya sedikit kendala yang dikarenakan keterbatasan siswa dalam fasilitas kebutuhan pembelajaran berbasis *daring* dan kesulitan orangtua dalam mendampingi anaknya mengikuti pembelajaran berbasis *daring*. 3). Evaluasi Teori Keputusan adanya pertemuan dalam penetapan keputusan dalam memberlakukan pembelajaran berbasis *daring* di kabupaten Bulukumba. Adapun faktor pendukung dan penghambat yang ada dalam pembelajaran berbasis *daring*.

Kata Kunci : Kebijakan Publik, Pembelajaran berbasis *daring*.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Implementasi Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di Desa Pulau Madu Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar". Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua tercinta saya, Ayahanda dan Ibunda atas segala kasih sayang, cinta, motivasi, serta doa yang tulus dan ikhlas yang senantiasa beliau panjatkan kepada Allah SWT sehingga menjadi semangat yang luar biasa bagi penulis dalam menggapai impian, serta keluarga yang selalu memberikan semangat, perhatian, saran, dan doa sehingga menjadi power bagi saya dalam menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini.
2. pembimbing I dan pembimbing II saya yang telah memberikan bimbingan dan segala arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ayahanda Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ibunda Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Ahmad Harakan, S.IP.MHI Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan dan

Program studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Makassar.

6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen, serta seluruh staff di ruang lingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Demikian kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Di akhir tulisan ini penulis memohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan, baik yang disadari maupun tidak disadari. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENERIMAAN TIM	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Penelitian Terdahulu.....	6
B. Landasan Teori	8
1. Evaluasi	8
2. Kebijakan Publik.....	9
3. Proses Perumusan Kebijaka Publik.....	11
4. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan	13
5. Dimensi Kebijakan Publik.....	14
6. Evaluasi Kebijakan Publik	16
7. Kebijakan Pembelajaran Di Masa Pandemi Covid-19	19
8. Perda Kabupaten Bulukumba	21
9. Dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba.....	24
C. Kerangka fikir.....	30
D. Fokus Penelitian	31
E. Deskripsi Fokus Penelitian	31
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	32
B. Jenis dan Tipe Penelitian	32
C. Sumber Data.....	33
D. Informan Penelitian	33
E. Teknik Pengumpulan Data	34
F. Teknik Analisis Data	35

G.	Pengabsahan Data	36
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	38
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	38
1.	Profil Singkat Kabupaten Bulukumba.....	38
2.	Profil Dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba	39
1.	Evaluasi kebijakan publik pembelajaran daring pada masa pandemi COVID 19 di kabupaten Bulukumba	43
2.	Evaluasi kebijakan publik dalam pembelajaran berbasis daring pada masa pandemi COVID 19 di Bulukumba.....	44
a.	Evaluasi Formal.....	44
b.	Evaluasi Semu.....	46
c.	Evaluasi Teori Keputusan	48
2.	Faktor Yang Mempengaruhi kualitas Evaluasi Kebijakan Publik Dalam Pembelajaran Daring Pada Masa Pandemi COVID 19 di Bulukumba	48
a.	Faktor Pendukung.....	50
b.	Faktor Penghambat	50
3.	Pembahasan Hasil Penelitian.....	51
BAB V	PENUTUP	53
A.	Kesimpulan	53
B.	Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	55



DAFTAR TABEL

1.1 Matriks Penelitian Terdahulu	6
3.1 Informan Penelitian.....	34



DAFTAR GAMBAR

2.2 Bagan Kerangka Pikir	30
4.2 Bagan Organisasi Dikbud Kabupaten Bulukumba	43



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hardiyansyah (2011) menyatakan bahwa Pelayanan publik adalah Melayani keperluan orang atau masyarakat atau organisasi yang memiliki kepentingan pada organisasi, sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditentukan dan ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada penerima layanan. Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan salah satu upaya negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga Negara atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 1 butir (1) menyatakan bahwa “pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”.

Pelayanan publik menjadi suatu tolak ukur kinerja pemerintah yang paling kasat mata. Masyarakat dapat langsung menilai kinerja pemerintah berdasarkan kualitas layanan publik yang diterima, karena kualitas pelayanan publik menjadi kepentingan banyak orang dan dampaknya langsung dirasakan masyarakat dari semua kalangan, di mana keberhasilan dalam membangun kinerja pelayanan publik secara profesional, efektif, efisien dan akuntabel akan mengangkat citra positif pemerintah di mata warga masyarakat (Wiryawan, 2020).

Paradigma *The New Public Service* (NPS) menempatkan warga tidak hanya sebagai customer tetapi sekaligus masyarakat dipandang sebagai *citizens* yang

mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas dari negara (birokrasi publik). Dalam konsep ini birokrasi publik dituntut untuk merubah dirinya dari government menjadi governance sehingga administrasi publik akan tampil lebih powerfull dalam menjelaskan masalah-masalah kontemporer yang terjadi di dalam bahasan publik.

Dalam konsep ini birokrasi publik tidak hanya menyangkut unsur pemerintah saja tetapi semua permasalahan yang berhubungan dengan *public affairs dan public interest*. Dalam kondisi perkembangan masyarakat yang dinamis, birokrasi publik harus dapat memberikan pelayanan publik yang lebih profesional, efektif, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif dan adaptif serta sekaligus dapat membangun kualitas manusia dalam arti meningkatkan kapasitas individu dan masyarakat untuk secara aktif menentukan masa depannya sendiri. Arah pembangunan kualitas manusia tadi adalah memberdayakan kapasitas manusia dalam arti menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat atau publik merasakan manfaat dari sistem pelayanan publik yang prima.

Ditengah masa pandemi virus Corona (*Covid-19*) ini menuntut masyarakat banyak melakukan adaptasi di kehidupan sehari-hari, adaptasi ini pun berlaku juga pada penyelenggaraan pelayanan publik. Kebijakan Pemerintah untuk mencegah menyebarnya virus ini telah banyak dikeluarkan, tentunya berdampak pada standar pelayanan publik yang diterapkan oleh penyelenggara layanan. Peningkatan standar pelayanan publik akan menjadi salah satu upaya pencegahan penyebaran virus ini. Situasi ini merupakan realitas baru yang juga dialami dunia pendidikan, yang semula dengan metode tatap muka di lembaga pendidikan ,kini diubah menjadi pembelajaran daring/online dan dilaksanakan dari rumah masing- masing untuk mencegah dan menanggulangi penyebaran virus *COVID-19* ini. Kebijakan

tersebut berlaku bagi semua jenjang pendidikan baik dari tingkat PAUD hingga tingkat perguruan tinggi. Hal ini merupakan langkah inisiatif dari pemerintah karena pembelajaran tidak harus bertemu langsung, tidak harus bertatap muka langsung, namun dilaksanakan dengan sosial media, media teknologi, dan aplikasi. Pembelajaran tersebut dikenal dengan pembelajaran daring (Suhendro, 2020).

Penerapan kebijakan studi secara daring yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai bentuk kewaspadaan sekaligus sikap pencegahan penyebaran *COVID-19* yang kian menyebar di Indonesia. Sebagai salah satu solusinya, kegiatan-kegiatan pembelajaran dapat dilakukan melalui pembelajaran jarak jauh baik dalam bentuk ceramah daring, ceramah model daring, termasuk pemberian berbagai tugas untuk dikerjakan di rumah.

Di Indonesia sendiri, terdapat beberapa aplikasi yang telah disediakan pemerintah untuk membantu kegiatan belajar di rumah. Sementara itu, pendidik juga dapat melakukan tatap muka dengan siswa-siswanya dengan bantuan aplikasi yang dapat diakses dengan jaringan internet. Namun, beberapa kendala yang ada dalam pembelajaran daring membuat peserta didik kurang berminat terhadap pembelajaran daring tersebut. Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang menggunakan jaringan internet dengan aksesibilitas, konektivitas, fleksibilitas, dan kemampuan untuk memunculkan berbagai jenis interaksi pembelajaran. Kenyataannya, pembelajaran daring masih menimbulkan permasalahan. Diantaranya mengakibatkan pergeseran peran antara guru dan orang tua selama pembelajaran daring.

Dalam proses pembelajaran secara daring (online) ini memberikan banyak sekali dampak, mulai dari dampak positif hingga dampak negatif. Pembelajaran secara daring (online) ini guru dituntut untuk mempersiapkan pembelajaran sebaik dan sekreatif mungkin dalam memberikan suatu materi.

Terutama dikalangan Sekolah Dasar (SD) atau di Madrasah Ibtidaiyah (MI) karena proses pembelajaran daring ini tidaklah mudah.

Dalam proses pembelajaran daring ini tidak hanya melibatkan guru dan siswa saja, melainkan orang tua juga dituntut untuk terlibat dalam proses pembelajaran daring ini. Orang tua dengan latar pendidikan yang tinggi mungkin akan sangat mudah beradaptasi dalam proses pembelajaran secara daring. Namun, orang tua dengan latar belakang pendidikan yang minim mungkin jauh lebih sulit untuk beradaptasi dengan proses pembelajaran secara daring ini dikarenakan minimnya pengetahuan akan teknologi. Jaringan internet yang lemah juga menjadi salah satu faktor yang dapat menghambat proses pembelajaran daring. Proses pembelajaran daring ini akan berjalan secara lancar jika kualitas jaringan internet tersebut lancar dan stabil. Proses pembelajaran secara daring (online) ini juga membuat guru kesulitan dalam menyampaikan materi pembelajaran, dikarenakan tidak semua siswa berantusias dalam mengikuti proses pembelajaran secara daring (online). Kondisi sekarang yang dapat digambarkan pada instansi pemerintahan menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada sistem pemerintahan yang belum efektif dan efisien berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul “**Evaluasi Kebijakan Publik Dalam Pembelajaran Berbasis Daring Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Bulukumba**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Evaluasi Kebijakan Publik Dalam Pembelajaran Berbasis Daring Pada Masa Pandemi *Covid 19* Di Bulukumba
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi Evaluasi Kebijakan Publik Dalam Pembelajaran Berbasis Daring Pada Masa Pandemi *Covid 19* Di Bulukumba

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana Evaluasi Kebijakan Publik Dalam Pembelajaran Berbasis Daring Pada Masa Pandemi *Covid 19* Di Bulukumba
- b. Untuk mengetahui apa saja factor yang mempengaruhi Evaluasi Kebijakan Publik Dalam Pembelajaran Berbasis Daring Pada Masa Pandemi *Covid 19* Di Bulukumba

D. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Secara Teoritis

1. Penelitian ini secara teoritis berguna untuk menjadi rujukan dalam pengembangan ilmu sosial dan ilmu politik khususnya dalam ruang lingkup Evaluasi Kebijakan Publik Dalam Pembelajaran Berbasis Daring Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Bulukumba.
2. Memberikan konsep baru yang dapat dijadikan acuan sebagai bahan perbandingan dan pertimbangan bagi penelitian di masa yang akan datang.

b. Kegunaan Praktis

1. Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi kalangan akademisi dalam melakukan kajian lebih lanjut yang berhubungan dengan kualitas pelayanan publik dalam pembelajaran berbasis daring pada masa pandemi *COVID 19* di Bulukumba.
2. Diharapkan agar tulisan ini dapat menjadi sumber informasi bagi pembaca dan peneliti, khususnya bagi mahasiswa yang sementara menyusun skripsi yang berkaitan dengan masalah-masalah kualitas pelayanan publik dalam pembelajaran berbasis daring pada masa pandemi *COVID 19* di Bulukumba.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan dasar dalam melakukan penelitian, sehingga memperkaya teori-teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian ini. Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh peneliti yang sebelumnya dapat ditunjukkan dengan tabel sebagai berikut :

2.1 Matriks Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian
1.	(Tamami, 2021)	Evaluasi pembelajaran daring di masa pandemi	Kegiatan pembelajaran tatap muka sangat dibutuhkan bagi peserta didik, gurudan juga orang tua atau wali peserta didik. Meskipun situasi dan kondisi masih dalam masa pandemi pembelajaran tatap muka bisa dilaksanakan dengan tetap menerapkan disiplin ketat protokol kesehatan
2.	(Lely Nurmaya et al., 2021)	Analisis evaluasi pembelajaran daring (online) Sekolah dasar selama pandemi covid 19	Evaluasi pelaksanaan pembelajaran daring diantaranya, partisipasi siswa dalam mengikuti pembelajaran daring , aplikasi yang digunakan dalam pembelajaran daring, kondisi kualitas jaringan selama pembelajaran daring, kualitas materi yang diberikan guru selama pembelajaran daring, ketersediaan waktu diskusi antara guru dan siswa selama pembelajaran daring. Hal lain ditemukan peneliti dari jawaban responden untuk pelaksanaan pembelajaran di semester selanjutnya menunjukkan kurang siap menghadapi.
3	(Ambarasari, Yuni, 2021)	Evaluasi pembelajaran daring selama pandemi covid-19 di kecamatan Bulukerto wonogiri	Pembelajaran daring adalah lebih parktis dan santai. Praktis karena dapat memberikan tugas setiap saat dan pelaporan tugas setiap saat.Kedua, lebih fleksibel bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Pembelajaran daring menyebabkan waktu yang lebih

			<p>fleksibel bagi wali yang bekerja di luar rumah dan bisa menyesuaikan waktu untuk mendampingi siswa belajar. Kelemahan dalam pembelajaran daring adalah kurang maksimalnya keterlibatan siswa. Keterlibatan siswa yang dimaksud dapat dilihat dari hasil keterlibatan siswa dalam mengikuti pembelajaran <i>daring</i> secara penuh dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran.</p>
--	--	--	---

Adapun perbedaan antar penelitian penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu :

Pada Penelitian Fitra Tamami mengkaji tentang Evaluasi pembelajaran *daring* di MTs N 4 Jombang dengan metode observasi adapun perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada focus penelitian dimana penelitian yang akan peneliti lakukan berfokus pada evaluasi pembelajaran *daring* di kabupaten Bulukumba

Selanjutnya pada penelitian Andi Lely dkk mengkaji evaluasi pembelajaran *daring* yang berfokus pada partisipasi siswa dalam proses pembelajaran *daring* dengan menggunakan google form adapun perbedaan ini pada penelitian yang akan peneliti lakukan berfokus pada kebijakan pemerintah daerah terkait pembelajaran *daring* di Kabupaten Bulukumba.

Pada Penelitian Rika Yuni Ambarsari mengkaji tentang tantangan yang di hadapi dalam pembelajaran *daring* sedangkan pada penelitian ini berfokus pada evaluasi kebijakan dalam pembelajaran *daring*.

Maka penelitian ini dilakukan guna mengetahui Evaluasi Kebijakan publik dalam pembelajaran berbasis daring di masa pandemic Covid-19 di Kabupaten Bulukumba.

B. Landasan Teori

1. Evaluasi

Menurut Vedung, *“Evaluation is the process of determining the merit, worth, and value of things”*. Kemudian Jones mengutip Carol H. Weiss (1991 : 356): Evaluasi adalah sebuah kata elastis yang meliputi segala macam pertimbangan. Penggunaan kata tersebut dalam arti umum adalah suatu istilah untuk menimbang manfaat. Seorang mengamati dan meneliti suatu fenomena (seseorang, sebuah benda maupun gagasan) berdasarkan beberapa ukuran yang eksplisit dan implisit. Untuk mendukung pendapat tersebut, secara singkat Jones (1991:356) menyatakan bahwa evaluasi adalah menilai manfaat dari proses serta program pemerintah (Dikson Silitonga, 2018).

Secara umum evaluasi dapat diartikan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating), dan penilaian (assessment). Dalam arti spesifik evaluasi berkaitan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijaksanaan. Evaluasi kebijakan adalah suatu kegiatan untuk menilai tingkat pencapaian tujuan kebijakan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan public merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka mencari informasi terkait hasil dari implementasi kebijakan secara keseluruhan, kemudian melakukan penilaian terhadap hasil dari kebijakan tersebut apakah baik dalam pelaksanaan, manfaat untuk dijadikan bahan rekomendasi untuk kebijakan selanjutnya. Evaluasi ditujukan untuk melihat sebagian-sebagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan.

Evaluasi kebijakan memiliki tujuan sebagai berikut :

- a. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. Melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan.
- b. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. Dengan evaluasi juga dapat diketahui biaya dan manfaat dari suatu kebijakan
- c. Mengukur tingkat kelulusan (outcome) suatu kebijakan. Salah satu tujuan evaluasi adalah mengukur biaya dan kualitas pengeluaran atau output dari kebijakan
- d. Mengukur dampak suatu kebijakan. Pada tahap lebih lanjut, ditunjukkan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik itu dampak
- e. Untuk mengetahui apabila terjadi penyimpangan. Evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target.
- f. Sebagai bahan masukan (Atiqurrahman, 2021)

2. Kebijakan Publik

Kebijakan merupakan sebuah rangkaian aktivitas, aksi, sikap, rencana program dan keputusan yang dilakukan oleh para aktor (pihak terkait) sebagai upaya dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi (Herdiana, 2018). Sebuah kebijakan merupakan hal yang penting dalam mencapai suatu tujuan pada organisasi. Kebijakan terdiri dari dua aspek yaitu (a) Kebijakan merupakan sebuah bentuk respon mengenai kejadian yang terjadi untuk menghasilkan harmonisasi dari pihak yang berkepentingan, menciptakan intensif atas perilaku pihak yang mendapatkan perlakuan yang tidak rasional atas kerja bersama, (b) Kebijakan merupakan sebuah praktik sosial. Kebijakan bukanlah hal yang bersifat tunggal maupun terisolir (Iskandar, 2012). Artinya

bahwa kebijakan merupakan suatu hal yang dihasilkan oleh pembuat kebijakan (pemerintah) sebagai bentuk perumusan yang didasari oleh peristiwa yang terjadi di masyarakat. Peristiwa tersebut dilahirkan dari proses kehidupan bermasyarakat yang bukan bersifat asing, terisolasi dan berdiri sendiri bagi masyarakat.

Kebijakan publik yang menghasilkan peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari komoditas politik yang berkaitan dengan kepentingan publik (Alam, 2012). Namun kebijakan publik dapat diperbaiki apabila terjadi dinamika yang berdampak kepada kebijakan tersebut. Oleh sebab itu kebijakan publik bersifat fleksibel yang bisai diperbaiki dan di sesuaikan berdasarkan perkembangan pembangunan. Proses perbaikan dan penyesuaian tersebut dipengaruhi oleh penilaian yang dilakukan masyarakat. Kebijakan publik tidak akan terlaksana apabila tidak ada proses pelaksanaan kebijakan publik tersebut. Pelaksanaan kebijakan publik merupakan rangkaian tindakan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan. Proses pelaksanaan kebijakan publik didasari pada mekanisme, sumber daya dan keterkaitan program kebijakan. Pelaksanaan kebijakan merupakan aktivitas lanjutan dari perumusan dan pengesahan kebijakan (Mutiasari et al, 2016). Maka dapat dimaknai bahwa pelaksanaan kebijakan publik merupakan aktivitas yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dalam mencapai suatu tujuan yang didasari oleh kebijakan yang telah disahkan. Dampak dari pelaksanaan kebijakan adalah munculnya konsekuensi dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Hasil pelaksanaan kebijakan yang dievaluasi akan mendapatkan hasil yang diharapkan (intended) atau juga hasil yang tidak diharapkan (spillover negative effect). Maka dapat disimpulkan bahwa setiap kebijakan yang ditetapkan akan memiliki dampak.

Untuk memahami berbagai definisi kebijakan publik, beberapa konsep kunci yang termuat dalam kebijakan publik menurut Young dan Quinn dalam (Edi Suharto, 2012: 44) :

- a. Tindakan pemerintah yang berwenang.
- b. Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata.
- c. Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan.
- d. Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu,
- e. Sebuah justifikasi yang dibuat oleh seorang atau beberapa orang aktor.

3. Proses Perumusan Kebijakan Publik

Proses perumusan kebijakan yaitu analisis kebijakan, pengesahan kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. a. Analisis Kebijakan E. S. Quade mengatakan dalam (Harbani Pasolong, 2008: 41), mengatakan bahwa asal mula analisis kebijakan disebabkan oleh banyaknya kebijakan yang tidak memuaskan. Begitu banyak kebijakan yang tidak memecahkan masalah kebijakan, bahkan menciptakan masalah baru. William N. Dunn, mengatakan bahwa analisis kebijakan adalah disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode penelitian dan argument untuk menghasilkan dan memindahkan informasi relevan dengan kebijakan, sehingga dapat dimanfaatkan ditingkat politik dalam rangka memecahkan masalah-masalah kebijakan. Nugroho (dalam Harbani Pasolong, 2008: 41) mengatakan bahwa analisis kebijakan pemahaman akan suatu kebijakan atau pula pengkajian untuk merumuskan suatu kebijakan.

Pengesahan Kebijakan M. Irfan Islamy (dalam Harbani Pasolong, 2008:

51) , mengatakan bahwa proses pengesahan kebijakan dapat dilakukan sebagai pembuatan keputusan. Oleh karena suatu usulan kebijakan yang dibuat oleh orang atau badan dapat saja usulan itu disetujui oleh pengesah kebijakan. Suatu usulan kebijakan diadopsi atau diberikan pengesahan oleh orang atau badan yang berwenang, maka usulan kebijakan tersebut berubah menjadi sasaran dari kebijakan tersebut. Oleh karena setiap kebijakan yang telah disahkan berarti telah siap untuk diimplementasikan. Proses pengesahan kebijakan adalah proses penyesuaian dan penerimaan secara bersama terhadap prinsip-prinsip yang diakui dan ukuran-ukuran yang diterima. Landasan utama untuk melakukan pengesahan kebijakan ialah variable sosial seperti sisten nilai masyarakat, ideologi negara, sistem politik dan sebagainya. (dalam Harbani Pasolong, 2008: 51)

Implementasi Kebijakan Bernadine R. Wijaya & Susilo Supardo (dalam Harbani Pasolong, 2008:57) mengatakan bahwa implementasi adalah proses mentransformasikan suatu rencana ke dalam praktik. Hinggis mendefinisikan implementasi sebagai rangkuman dari berbagai kegiatan yang didalamnya sumber daya manusia menggunakan sumber daya lain untuk mencapai sasaran strategi.

Evaluasi Kebijakan Evaluasi digunakan untu mempelajari tentang hasil yang diperoleh dalam suatu program untuk dikaitkan dalam pelaksanaanya, mengendalikan tingkah laku dari orang-orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program, dan mempengaruhi respon dari mereka yang berada diluar lingkungan politik. Evaluasi, tidak saja berguna untuk menjastifikasikan kegunaan dari program yang sedang berjalan, tetapi juga untuk melihat kegunaan program dan inisiatif baru, peningkatan efektivitas

manajemen dan administrasi program, dan mempertanggung jawabkan hasil kepada pihak yang mensponsori program tersebut Rossi dan Freeman. (dalam Harbani Pasolong, 2008: 60)

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kebijakan George C. Edwards III mengajukan empat variable atau faktor yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Variable-variabel tersebut tidak saja selalu berdiri sendirisendiri, namun dapat saja saling terkait satu sama lain. Variabel tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Komunikasi Untuk menjamin keberhasilan implementasi kebijakan, pelaksana harus mengetahui betul apa yang harus dilakukannya berkaitan dengan pelaksana kebijakan tersebut. Selain itu, kelompok sasaran kebijakan juga harus diinformasikan mengenai apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan. Ini penting untuk menghindari adanya resistensi dari kelompok sasaran. Dengan demikian untuk kepentingan tersebut perlu dilakukan sosialisasi yang intensif tentang kebijakan yang dimaksud. Sosialisai dalam hal ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, diantaranya melalui media cetak ataupun media elektronik.
- b. Sumber daya Keberhasilan implementasi kebijakan selain ditentukan oleh kejelasan informasi, juga ditentukan oleh sumber daya yang memadai, tentu implementasi kebijakan tidak akan berjalan secara optimal. Sumber daya sebagai pendukung implementasi kebijakan dapat berwujud sumber daya manusia yakni kompetensi implementor, dan sumber daya finansial. Sumber daya merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan agar

kebijakan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya akan menjadi sekedar angan-angan ataupun dokumen diatas kertas semata.

- c. Disposisi Disposisi yang dimaksud di sini adalah menyangkut watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti; komitmen, kejujuran, sifat demokratis dsb. Disposisi yang dimiliki oleh implementor menjadi salah satu variable penting dalam implementasi kebijakan. Apabila implentor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik sebagaimana yang diharapkan oleh pembuat kebijakan.

5. Dimensi Kebijakan Publik

Berdasarkan beberapa konsep dan sifat tindakan yang berkenaan dengan pelaksanaan Good Governance, menurut pemahaman penulis maka pelaksanaan kebijakan dapat diukur/ dievaluasi

berdasarkan dimensi-dimensi: konsistensi, transparansi, akuntabilitas, keadilan, efektivitas, dan efisiensi.

- a) Konsistensi Pelaksanaan kebijakan berlangsung dengan baik apabila pelaksanaan kebijakan dilakukan secara konsisten dengan berpegang teguh pada prosedur dan norma yang berlaku (Mutiasari, Yamin, & Alam, 2016).
- b) Transparansi Transparansi merupakan kebebasan akses atas informasi yang patut diketahui oleh publik dan/ atau pihak-pihak yang berkepentingan (Coryanata, 2012). Informasi yang berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan publik perlu dilakukan bersifat terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh semua pihak yang memerlukan, dan disediakan secara

memadai, serta mudah dimengerti (Rohman, 2016).

- c) Akuntabilitas Setiap aktivitas pelaksanaan kebijakan publik harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif maupun substantif, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan (Rohman, 2016).
- d) Keadilan Keadilan secara umum dapat dipahami sebagai kebaikan, kebajikan, dan kebenaran, yang mengikat antara anggota masyarakat dalam mewujudkan keserasian antara penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban (Nasution, 2016). Keadilan dalam kebijakan publik diwujudkan pada aktivitas pelayanan yang tidak diskriminatif. Pelaksanaan kebijakan publik tidak membedakan kualitas pelayanan pada kelompok sasaran berdasarkan pertimbangan suku, ras, agama, golongan, status sosial, dan lain-lain (Rohman, 2016).
- e) Partisipatif Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan. Partisipasi masyarakat disamping menopang pencetapan pelaksanaan kebijakan, pada sisi lain akan berdampak pada proses evaluasi/ kontrol atas kinerja pemerintah dan dapat mampu menimalisir penyalahgunaan wewenang. Partisipasi masyarakat merupakan kunci sukses dari pelaksanaan kebijakan publik karena dalam partisipasi menyangkut aspek pengawasan dan aspirasi. Pengawasan yang dimaksud di sini termasuk pengawasan terhadap pihak eksekutif melalui pihak legislatif (Coryanata, 2012). Berdasarkan uraian tersebut, pelaksanaan kebijakan sebaiknya bersifat partisipatif, yaitu pelaksanaan kebijakan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, kepentingan, dan harapan

masyarakat (Rohman, 2016)

- f) Efektivitas Efektifitas berkenaan dengan pencapaian hasil yang telah ditetapkan, atau pencapaian tujuan dari dilaksanakannya tindakan, yang berhubungan dengan aspek rasionalitas teknis, dan selalu diukur dari unit produk atau layanan (Dunn, 2003). Dalam pelaksanaan kebijakan publik, efektifitas diukur dari keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada kebijakan publik.
- g) Efisiensi Efisiensi berkenaan dengan jumlah penggunaan sumberdaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi merupakan hubungan antara efektivitas dan penggunaan sumberdaya (Dunn, 2003). Indikator ukuran yang dapat digunakan pada dimensi efisiensi adalah penggunaan sumberdaya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, yang bisa diukur dengan tingkat penggunaan waktu, biaya, manusia, peralatan, dan sumberdaya lainnya

6. Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi kebijakan dapat meliputi penilaian atau pemberian nilai atas kebijakan itu sendiri. selain itu, evaluasi kebijakan juga dapat menilai latar belakang dan dan tujuan diambilnya suatu kebijakan, bagaimana kebijakan tersebut di implementasikan ,dan bagaimana hasil dari kebijakan tersebut lalauperbandingannya dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Dunn (2003), secara umum, istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating), dan penilaian (assessment). Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hail kebijakan. Masih menurut Dunn evaluasi member informasi yang valid dan dapat dipercaya

mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik; evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target; dan evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Jadi, meskipun berkenaan dengan keseluruhan proses kebijakan, evaluasi kebijakan ini lebih berkenaan pada kinerja dari kebijakan, khususnya pada implementasi kebijakan publik.

a. Evaluasi Formal (*Formal Evaluation*).

Evaluasi formal adalah evaluasi yang dilakukan dengan tujuan, sasaran dan informasi lain yang tertera dalam dokumen resmi sebagai variabel nilai resmi atau formal, yang kemudian digunakan sebagai pembandingan dengan kenyataan di lapangan. Pada pendekatan ini evaluasi dilakukan dengan menilai tercapai atau tidaknya tujuan maupun sasaran yang telah dicantumkan secara formal dalam dokumen resmi. Sifat dari evaluasi formal adalah melakukan penilaian berdasarkan parameter yang ada pada dokumen formal seperti tujuan dan sasaran yang tercantum dalam dokumen kebijakan, peraturan perundang-undangan dan sebagainya. Dalam evaluasi formal, metode yang ditempuh untuk menghasilkan informasi yang valid dan reliabel ditempuh dengan beberapa cara antara lain: Merunut legislasi (peraturan perundang-undangan); Merunut kesesuaian dengan kebijakan yang tercantum pada dokumen formal yang memiliki hierarki di atasnya; Merunut dokumen formal (kesesuaian dengan hasil yang diharapkan /tujuan dan sasaran); dan Interview dengan penyusun kebijakan atau administrator program.

b. Evaluasi Semu (*Pseudo Evaluation*).

Evaluasi semu pada intinya dilakukan dengan menggunakan sistem nilai individual untuk menilai sistem publik. Pada pendekatan semu ini nilai-nilai yang dipilih sebagai variabel bagi suatu program maupun kebijakan adalah nilai-nilai pribadi yang sifatnya non-konvensional atau dapat diterima oleh publik. Variabel penilai yang dianggap kontroversial tidak diperhatikan dalam pendekatan semu ini untuk menghindari pelaksanaan evaluasi yang tidak objektif. Sifat dari evaluasi semu ini adalah melakukan penilaian berdasarkan parameter tertentu yang secara umum disepakati (*self evident*) dan tidak kontroversial (*uncontroversial*). Hasil evaluasinya mudah diterima oleh publik dan tidak terlalu rumit (*complicated*). Penilaiannya berkisar antara gagal atau berhasil. Evaluasi semu ini seringkali dijadikan sebagai salah satu metode monitoring.

c. Evaluasi Teori Keputusan (*Decision Theoretic Evaluation/DTE*).

Evaluasi teori keputusan adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai kebijaksanaan yang menyangkut banyak pihak (*stakeholders*) yang berkonflik antara satu sama lainnya, sehingga pengambilan keputusan sulit dilakukan karena banyak perbedaan pendapat. Sifat dari DTE adalah melakukan penilaian berdasarkan parameter yang disepakati oleh pihak-pihak yang terkait secara langsung/pihak yang bersitegang. Sistem nilainya juga berdasarkan kesepakatan antara pihak yang bersitegang. Biasanya berkisar antara benar atau salah (Putra, 2012).

7. Kebijakan Pembelajaran Di Masa Pandemi Covid-19

Surat Edaran ini diterbitkan pada tanggal 24 Maret 2020, surat edaran ini ditujukan kepada seluruh Gubernur dan Bupati atau Walikota di Indonesia. Berkenaan dengan penyebaran Covid-19 yang semakin meningkat, maka kesehatan dari seluruh warga sekolah menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan pendidikan. Surat Edaran ini fokus pada pemberian arahan kepada sekolah dalam pelaksanaan pendidikan di masa pandemi Covid-19.

Dari poin-poin yang ada dalam Surat Edaran ini dapat diambil menjadi tiga hal, yaitu pelaksanaan ujian nasional, pelaksanaan pembelajaran dari rumah (BDR), dan ujian kenaikan kelas. Pelaksanaan ujian nasional 2020 ditiadakan, sehingga ujian nasional tidak menjadi syarat kelulusan sekolah, termasuk Uji Kompetensi Keahlian bagi Sekolah Menengah Kejuruan. Nilai kelulusan diganti dengan nilai rapor lima semester terakhir dan prestasi yang diperoleh sebelumnya. Dibatalkannya Ujian Nasional (UN), melihat kondisi yang terjadi saat ini. Dimana penularan covid-19 terjadi begitu cepat sehingga tidak diperbolehkan mengumpulkan siswa di sekolah.

Proses pembelajaran di sekolah ditiadakan, diganti dengan Belajar Dari Rumah (BDR). Dengan tujuan agar dapat memutus mata rantai penularan Covid-19. Belajar dari rumah difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup, namun siswa juga tetap diberi tugas dari guru melalui media yang sudah ditentukan oleh pihak sekolah untuk melaksanakan belajar dari rumah (Latifah, 2020).

Selanjutnya pemerintah kembali mengeluarkan Surat Keputusan yang diterbitkan pada 18 Mei 2020 yang ditujukan kepada seluruh Gubernur, Bupati atau Walikota di Indonesia. 59 Surat edaran ini melengkapi surat edaran sebelumnya, di masa darurat penyebaran Covid-19 peserta didik juga harus tetap

mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan. Dari poin-poin yang ada dalam surat edaran ini, dapat diambil dua poin besar, yaitu Pelaksanaan pembelajaran dari rumah dilaksanakan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, dan pelaksanaan belajar dari rumah.

Di masa pandemi Covid-19 ini, mengharuskan orang tua lebih mengawasi kegiatan keluarganya, terutama kegiatan anak. Sehingga Orang tua lebih perhatian kepada anak supaya menerapkan pola hidup bersih dan sehat (PHBS). Penerapan PHBS pada setiap orang berdampak positif, yaitu untuk memutus mata rantai penularan Covid-19. Melihat kondisi darurat seperti ini, proses pembelajaran dilaksanakan secara jarak jauh dari rumah. Adapun metode ataupun pendekatan yang digunakan diserahkan kepada setiap satuan pendidikan dan guru.

Pelaksanaan pembelajaran dari rumah ini dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pembelajaran jarak jauh dalam jaringan (*daring*) dan pembelajaran jarak jauh luar jaringan (*luring*). Hal tersebut melihat dari situasi dan kondisi wilayah yang memiliki akses internet, sehingga guru harus menggunakan pendekatan yang berbeda sesuai dengan kondisi yang ada. Untuk pembelajaran *daring*, teknis pembelajaran dan pemberian tugasnya menggunakan gadget maupun laptop melalui beberapa portal dan aplikasi pembelajaran maupun lewat whatsapp. Sedangkan untuk pembelajaran *luring* ini, dilaksanakan melalui televisi, radio, bahan ajar cetak, benda lingkungan sekitar dan lain sebagainya. Perubahan kegiatan belajar mengajar selama pandemi ini, juga berpengaruh pada perubahan pelaksanaan pembelajaran. Dimana pelaksanaan pembelajaran selama pandemic Covid-19 ini dilakukan oleh dinas pendidikan, satuan pendidikan, guru, peserta didik dan orang tua. Pelaksanaan belajar dari rumah oleh dinas pendidikan ini dengan melakukan koordinasi secara *daring* dengan kementerian pendidikan dan

kebudayaan terkait pelaksanaan BDR. Dinas pendidikan setempat menyusun kebijakan dan program selama masa darurat Covid-19. Melakukan kerjasama dengan televisi dan radio setempat guna menunjang pembelajaran luring di daerah yang ada listrik. Penetapan model pengelolaan pendidikan selama BDR dilakukan kepala satuan pendidikan. Selain itu, satuan pendidikan dapat melakukan pelatihan dan bimbingan teknis kepada guru untuk menunjang guru dalam penguasaan iptek. Selama BDR berlangsung, baik guru maupun tenaga kependidikan bekerja dari rumah dengan tetap memperhatikan komunikasi yang baik agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Bila dirasa perlu, kepala satuan pendidikan juga membuat jadwal piket ke sekolah secara bergantian dengan yang lainnya

8. Perda Kabupaten Bulukumba

Untuk persiapan terwujudnya tatanan normal baru dan menciptakan masyarakat yang sehat serta produktif di tengah wabah *Corona Virus Disease* 2019 (COVID19) perlu dilakukan penanganan dalam memutus mata rantai Covid 19,

berdasarkan pertimbangan maka, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Operasional Protokol Kesehatan Dalam Wilayah Kabupaten Bulukumba.

Penerapan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) pembelajaran di sekolah dan/atau institusi pendidikan, meliputi:

- a) memastikan area sekolah dan/atau institusi pendidikan dengan melakukan pembersihan lantai, pegangan tangga, meja dan kursi, tombol lift, pegangan pintu masuk/keluar, alat peraga/edukasi, komputer, keyboard dan alat pendukung pembelajaran dengan disinfektan dengan cara dilap atau disemprot secara berkala minimal sekali dalam sehari;
- b) menyediakan sarana cuci tangan yang dilengkapi air dan sabun atau

pencuci tangan berbasis alkohol di sejumlah lokasi strategis sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan;

- c) menginstruksikan kepada warga sekolah atau institusi pendidikan melakukan cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol, dan perilaku hidup bersih sehat (PHBS);
- d) memonitor absensi (ketidakhadiran) warga sekolah, jika diketahui tidak hadir karena sakit dengan gejala demam batuk/pilek, sakit tenggorokan dan sesak napas disarankan untuk segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri;
- e) memberikan himbauan kepada warga sekolah atau institusi pendidikan yang sakit dengan gejala demam batuk/pilek, sakit tenggorokan dan sesak napas untuk mengisolasi diri di rumah dengan tidak banyak melakukan kontak dengan orang lain;
- f) seluruh warga sekolah atau institusi pendidikan untuk tidak berbagi makanan, minuman, termasuk peralatan makan, minum dan alat musik tiup yang akan meningkatkan risiko terjadinya penularan penyakit;
- g) jika terdapat ketidakhadiran dalam jumlah besar karena sakit yang berkaitan dengan pernapasan, Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan;
- h) pihak sekolah atau institusi pendidikan harus bisa melakukan skrining awal terhadap warga sekolah atau institusi pendidikan yang punya keluhan sakit, untuk selanjutnya diinformasikan dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- i) menginstruksikan kepada warga sekolah atau institusi pendidikan wajib menggunakan masker dan menghindari kontak fisik dengan bersalaman,

cium tangan, berpelukan, dan sebagainya;

- j) untuk sementara pihak sekolah atau institusi pendidikan juga diharapkan menunda kegiatan yang mengumpulkan banyak orang atau kegiatan di luar lingkungan sekolah;
- k) pihak sekolah atau institusi pendidikan wajib melakukan skrining awal berupa pengukuran suhu tubuh terhadap semua tamu yang datang ke institusi pendidikan; dan
- l) dalam hal ditemukan adanya siswa/siswi sekolah atau institusi pendidikan yang menjadi pasien dalam pengawasan maka akan ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur penanganan Corona Virus Disease (COVID-19), yang meliputi:
 - a) petugas medis dibantu satuan pengamanan melakukan evakuasi dan penyemprotan disinfektan secara mandiri pada seluruh tempat, fasilitas dan peralatan sekolah atau institusi pendidikan; dan
 - b) penghentian sementara dilakukan hingga proses evakuasi dan penyemprotan disinfektan serta pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan isolasi siswa/ siswi yang pernah melakukan kontak fisik dengan siswa/siswi yang terpapar Corona Virus Disease (COVID-19) telah selesai.

9. Dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba

Penyebaran covid-19 berdampak pada semua aspek termasuk pendidikan yang kurang lebih setahun 6 bulan terakhir pelaksanaan pembelajaran tatap muka tidak dilaksanakan dan diganti dengan pembelajaran *daring*.

Dalam rangka menjamin kelancaran proses pembelajaran, memudahkan pendidik dan peserta didik mengakses layanan pembelajaran, dan menindak lanjuti Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Data Pokok Pendidikan untuk Akun Akses Layanan Pembelajaran, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) menyediakan akun akses layanan pembelajaran bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan, sebagai berikut :

- a) Akun Akses Layanan Pembelajaran, yang selanjutnya disebut Akun Pembelajaran merupakan akun yang memuat nama akun (user ID) dan akses masuk akun (password) yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan dapat digunakan oleh peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan sebagai akun untuk mengakses layanan pembelajaran berbasis elektronik.
- b) Akun Pembelajaran bertujuan untuk mendukung proses pembelajaran di satuan pendidikan melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi, baik belajar dari rumah maupun pembelajaran secara tatapmuka.
- c) Akun Pembelajaran ditujukan bagi:
 - 1) peserta didik, meliputi:

- a) SD dan Program Paket A kelas 5 dan kelas 6;
 - b) SMP dan Program Paket B kelas 7 sampai dengan kelas 9;
 - c) SMA dan Program Paket C kelas 10 sampai dengan kelas 12;
 - d) SMK\ kelas 10 sampai dengan kelas 13;
 - e) SLB kelas 5 sampai dengan kelas 12;
- 2) pendidik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah;
 - 3) tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, meliputi:
 - ⇒ kepala satuan pendidikan; dan
 - ⇒ operator satuan pendidikan, yang terdata di Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
 - d) Akun Pembelajaran dibuat dalam bentuk akun Google dengan domain @belajar.id.
 - e) Akun Pembelajaran dibuat dalam bentuk akun Google dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - ⇒ pengguna Akun Pembelajaran otomatis mendapatkan akses ke layanan pendukung pembelajaran dalam G Suite for Education yang siap pakai dan telah banyak digunakan oleh publik;
 - ⇒ pembuatan dan penggunaan Akun Pembelajaran bebas biaya;
 - ⇒ penggunaan layanan pendukung pembelajaran dalam G Suite for Education bebas biaya;
 - ⇒ sistem Google mampu mengelola puluhan juta akun sekaligus dengan keamanan tingkat tinggi; dan
 - ⇒ akun yang sama dapat digunakan untuk mengakses layanan lain milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan

berbagai layanan pembelajaran lainnya di luar ekosistem Google.

- f) Layanan pembelajaran berbasis elektronik yang dapat diakses menggunakan Akun Pembelajaran, antara lain:
- ⇒ surat elektronik;
 - ⇒ penyimpanan dan pembagian dokumen secara elektronik;
 - ⇒ pengelolaan administrasi pembelajaran secara elektronik;
 - ⇒ penjadwalan proses pembelajaran secara elektronik; dan
 - ⇒ pelaksanaan proses pembelajaran secara *daring*, baik secara sinkronus (dilakukan pada waktu yang bersamaan) maupun asinkronus (fleksibel dan tidak harus dalam waktu yang bersamaan). Terkait daftar layanan pembelajaran berbasis elektronik lain dapat diakses menggunakan Akun Pembelajaran pada laman www.belajar.id.
- g) Keamanan Akun Pembelajaran diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap:
- ⇒ kerahasiaan data, informasi, dan/atau dokumen aktivitas Akun Pembelajaran; dan
 - ⇒ kemungkinan terjadinya kelalaian dalam penggunaan dan/atau penyalahgunaan data, informasi, dan/atau dokumen aktivitas Akun Pembelajaran.
- h) Penggunaan Akun Pembelajaran bersifat opsional. Dalam hal Akun Pembelajaran tidak diakses oleh peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan sama sekali sampai dengan tanggal 30 Juni 2021 maka

Akun Pembelajaran tersebut akan dinonaktifkan secara otomatis.

i) Pendistribusian Akun Pembelajaran dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

⇒ operator satuan pendidikan masuk ke laman pd.data.kemdikbud.go.id dengan menggunakan akun Dapodik yang sudah dimiliki;

⇒ setelah masuk laman tersebut, operator satuan pendidikan memilih tombol “Unduh Akun” untuk mengunduh CSV yang berisi daftar nama akun (user ID) dan akses masuk akun (password) Akun Pembelajaran di satuan pendidikan yang bersangkutan; dan

⇒ operator satuan pendidikan mendistribusikan Akun Pembelajaran tersebut kepada setiap pengguna Akun Pembelajaran di satuan pendidikan yang bersangkutan.

j) Pengaktifan Akun Pembelajaran dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

⇒ masuk laman mail.google.com;

⇒ mengakses Akun Pembelajaran sesuai dengan nama akun (user ID) dan akses masuk akun (password) Akun Pembelajaran yang diterima;

⇒ menyetujui syarat dan ketentuan penggunaan Akun Pembelajaran; dan

⇒ melakukan penggantian akses masuk akun (password) Akun Pembelajaran.

- k) Pemerintah Daerah diharapkan membantu menyosialisasikan cara aktivasi Akun Pembelajaran ke peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan.
- l) Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota diharapkan menugaskan 2 (dua) orang pegawai untuk menjadi administrator Akun Pembelajaran di daerah masing-masing. Administrator Akun Pembelajaran tersebut dapat melakukan proses pengawasan terhadap aktivitas pengguna Akun Pembelajaran dan memonitor tingkat penggunaan Akun Pembelajaran.
- m) Pengajuan administrator Akun Pembelajaran dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
- ⇒ Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota mengusulkan 2 (dua) orang pegawai kepada Pusdatin untuk menjadi administrator Akun Pembelajaran dengan melampirkan informasi sebagai berikut:
 - 1) nama lengkap;
 - 2) Nomor Induk Kependudukan (NIK); dan
 - 3) alamat surat elektronik.
 - ⇒ Pusdatin akan memberikan nama akun (user ID) dan akses masuk akun (password) Akun Pembelajaran dalam bentuk CSV file ke alamat surat elektronik. CSV file tersebut hanya dapat dibuka dengan cara memasukkan NIK.
 - ⇒ Administrator Akun Pembelajaran mengakses Akun Pembelajaran sesuai instruksi yang disampaikan ke alamat surat

elektronik.

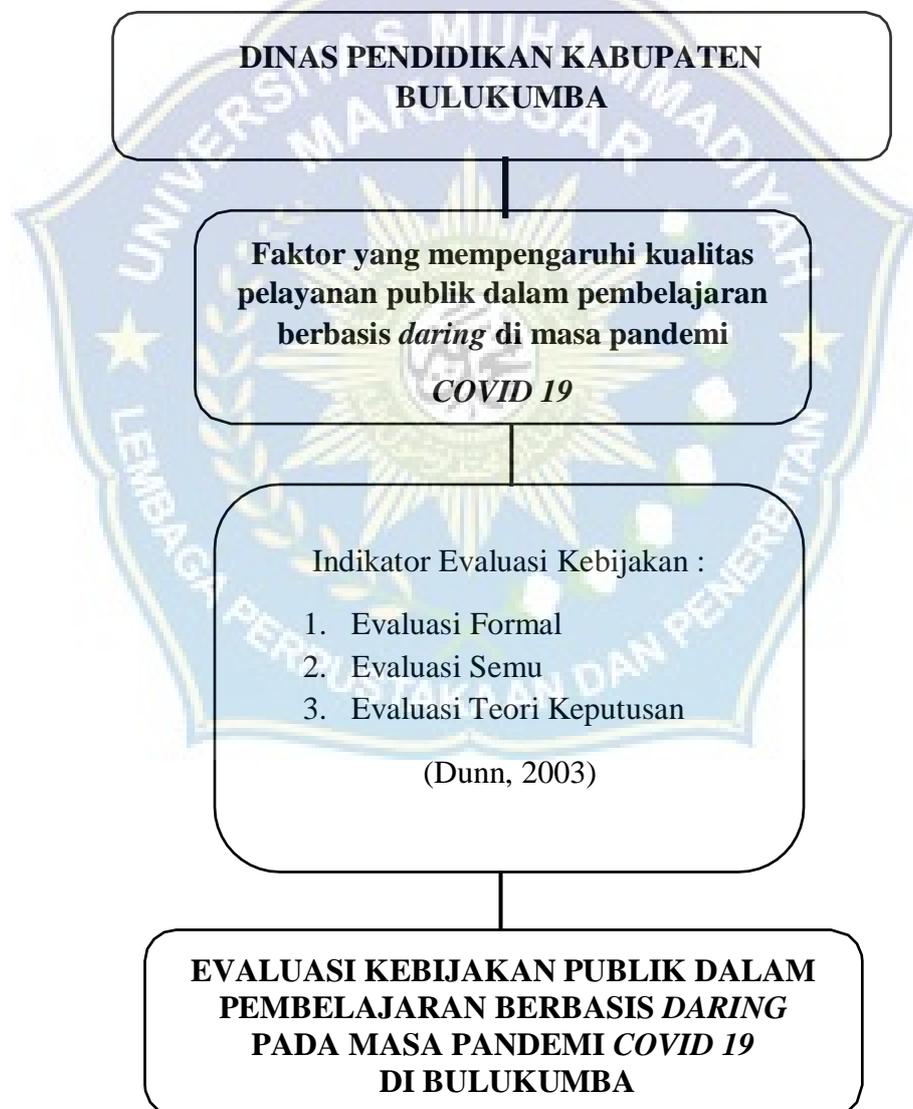
- n) Pemerintah Daerah dan pengguna Akun Pembelajaran yang memerlukan informasi mengenai Akun Pembelajaran dapat mengakses laman www.belajar.id.



C. Kerangka fikir

Berdasarkan latar belakang penelitian dan rumusan masalah yang telah dijelaskan pada Bab sebelumnya, berikut akan dijelaskan kerangka penelitian yang mendukung Kerangka pikir merupakan model konseptual akan teori yang saling berhubungan satu sama lain terhadap berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

2.2 Bagan Kerangka Pikir



D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan. Adapun fokus pada penelitian evaluasi kebijakan publik dalam pembelajaran berbasis *daring* pada masa pandemi *covid 19* di Bulukumba yaitu : evaluasi formal, evaluasi semu, dan evaluasi teori keputusan.

E. Deskripsi Fokus Penelitian

a. Evaluasi Formal

Maksud dari evaluasi formal disini ialah bagaimana penilaian pada evaluasi yang telah ada sasaran dan dicantumkan dengan dokumen resmi, berjalannya sesuai tujuan dilaksanakannya pembelajaran *daring* yang terlaksana dengan sesuai tujuan tanpa kendala.

b. Evaluasi Semu

Sebagaimana dilakukan penilaian yang telah disepakati terlaksana tanpa adanya pro dan kontra dalam berjalannya kebijakan pembelajaran *daring* di kabupaten Bulukumba.

c. Evaluasi Teori Keputusan

Maksud dari teori keputusan ialah penilaian berdasarkan parameter yang disepakati oleh pihak-pihak yang terkait secara langsung/pihak yang berkaitan dengan evaluasi pembelajaran *daring* di Kabupaten Bulukumba.

d. Faktor yang mempengaruhi kualitas Evaluasi kebijakan dalam pembelajaran berbasis *daring* pada masa pandemi *COVID 19* di Bulukumba.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu yang di butuhkan oleh peneliti untuk melaksanakan penelitian ini yaitu kurang lebih selama dua (2) bulan terhitung setelah ujian proposal di laksanakan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi penelitian di Dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba. Alasan peneliti mengambil lokasi di Dinas Pendidikan di Kabupaten Bulukumba yaitu mengingat pelayanan publik merupakan kebutuhan masyarakat terlebih dimasa pandemi saat ini termasuk dunia pendidikan sehingga saya tertarik untuk meneliti hal tersebut.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif, dimana penelitian ini berangkat dari data lapangan dan menggunakan teori yang sudah ada sebagai pendukung, kemudian hasil yang di dapat dari proses penelitian akan memunculkan teori dari data tersebut

2. Tipe penelitian

Tipe penelitian ini adalah deskriptif studi kasus dimaksudkan untuk memberi gambaran secara jelas dan mengklarifikasi mengenai masalah-masalah kenyataan sosial yang diteliti. Adapun masalah yang diteliti adalah Kualitas pelayanan publik dalam pembelajaran berbasis *daring* pada masa

pandemi *COVID* 19 di Bulukumba.

C. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer yaitu data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.
2. Data Sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data, misalnya studi kepustakaan baik berupa buku, jurnal, majalah, dan dokumen lainnya.

D. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian adalah orang atau pelaku yang benar-benar tahu dan menguasai masalah, serta terlibat langsung dengan masalah penelitian. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, maka peneliti sangat erat kaitannya dengan faktor-faktor kontekstual, jadi dalam hal ini sampling juga dijangkau sebanyak mungkin informasi dari berbagai sumber. Maksud kedua dari informan adalah untuk menggali informasi yang menjadi dasar dan rancangan teori yang dibangun. Pemilihan informan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah berdasarkan pada asas subjek yang menguasai permasalahan, memiliki data, dan bersedia memberikan informasi lengkap dan akurat. Informan yang bertindak sebagai sumber data dan informasi harus memenuhi syarat. Adapun yang menjadi sumber informasi dalam penelitian yakni:

3.1 Tabel Informan Penelitian

No.	Nama	Inisial	Jabatan
1.	Bustang,S.Pd	BS	Kabid Pembinaan Ketenagaan
2.	Anugrah Oetsman,S.Pt, M.Si	AO	Kasubag Program dan Pelaporan
3.	Syahrul Alam, S.E	SA	Kasubag Umum
4.	A.Rahmawati Hamsah, S.Pd	ARH	Guru
5.	A. Aulia Novriani,S.Pd	AAN	Guru
6.	Suriani	SU	Masyarakat/Orangtua siswa

E. Teknik Pengumpulan Data

Menyusun instrumen adalah pekerjaan yang paling penting dalam langkah penelitian. Akan tetapi mengumpulkan data jauh lebih penting lagi untuk memperoleh hasil yang sesuai dengan kegunaannya. Metode atau cara pengumpulan data yang penyusun gunakan dalam penyusunan skripsi ini yaitu dengan cara observasi, *interview* (wawancara), dan dokumentasi.

1. Observasi merupakan suatu aktifitas yang dilakukan untuk mengetahui kondisi sebenarnya dilapangan dilakukan oleh peneti secara berkesinambungan sehingga memperoleh fakta sesungguhnya di lapangan. Dalam penelitian ini observasi dilakukan ketika diperlukan pengecekan langsung terhadap Evaluasi Kebijakan dalam pembelajaran berbasis *daring* pada masa pandemi *COVID 19* di Bulukumba”.
2. Interview (wawancara) merupakan sebuah aktivitas yang dikerjakan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi yang akurat dari informan secara langsung. Dalam penelitian ini menggunakan wawancara mendalam untuk memperoleh keterangan, yang dilakukan dengan tanya jawab secara langsung

oleh peneliti dengan sumber, dengan bantuan pedoman agar mempermudah proses wawancara.

3. Dokumentasi merupakan kegiatan untuk memperoleh data dari narasumber, data yang diperoleh yaitu melalui rekaman dan dokumen. Dokumen digunakan untuk memudahkan penulis dalam pengumpulan data-data yang dibutuhkan. Tujuan digunakan metode ini untuk memperoleh data secara jelas dan konkret tentang Evaluasi Kebijakan dalam pembelajaran berbasis *daring* pada masa pandemi *COVID 19* di Bulukumba”.

F. Teknik Analisis Data

Analisa data ialah langkah selanjutnya untuk mengolah data dari hasil penelitian menjadi data, dimana data diperoleh, dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa untuk menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisa interaktif (*interactive model of analysis*). Dalam model ini terdapat 3 komponen pokok, ketiga komponen menurut Miles dan Huberman (Sugiyono, 2017) tersebut yaitu:

1. Reduksi Data merupakan komponen pertama analisi data yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga simpulan peneliti dapat dilakukan.
2. Sajian Data merupakan suatu rakitan informasi yang memungkinkan kesimpulan. Secara singkat dapat berarti cerita sistematis dan logis supaya makna peristiwanya menjadi lebih mudah dipahami.
3. Penarikan Kesimpulan dalam awal pengumpulan data peneliti sudah harus mulai mengerti apa arti dari hal-hal yang ia temui dengan mencatat peraturanperaturan sebab akibat, dan berbagai proporsi sehingga penarikan kesimpulan dapat di

pertanggung jawaban.

G. Pengabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif terdapat berbagai macam cara untuk menguji keabsahan data yang diperoleh salah satunya teknik triangulasi. Menurut Sugiyono (2017) Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Untuk menguji keabsahan data pada rumusan masalah, maka peneliti menggunakan triangulasi menurut Sugiyono, yaitu :

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh melalui hasil pengamatan, wawancara dan dokumen-dokumen yang ada. Kemudian peneliti membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam hal ini data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumen. Apabila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena sudut pandangnya berbeda-beda.

3. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya. Triangulasi dapat jugadilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian, dari tim peneliti lain yang diberi tugas melakukan pengumpulan data.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Singkat Kabupaten Bulukumba

Kabupaten Bulukumba terletak dibagian Selatan dari jazirah Sulawesi Selatan dan berjarak 153 km dari Makassar (Ibu kota Propinsi Sulawesi Selatan). Luas wilayah Kabupaten Bulukumba 1.154,67km² atau 1,85% dari luas wilayah Propinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Bulukumba terdiri dari 10 Kecamatan yaitu Kecamatan Ujungbulu (Ibu kota Kabupaten), Kecamatan Gantarang, Kecamatan Kindang, Kecamatan Rilau Ale, Kecamatan Bulukumba, Kecamatan Ujungloe, Kecamatan Bontobahari, Kecamatan Bontotiro, Kecamatan Kajang dan Kecamatan Herlang. Secara geografis Kabupaten Bulukumba terletak pada koordinat antara 5°20" sampai 5°40" Lintang Selatan dan 119°50" sampai 120°28" Bujur Timur. Batas-batas wilayahnya adalah: Sebelah Utara: Kabupaten Sinjai Sebelah Selatan: Kabupaten Kepulauan Selayar Sebelah Timur: Teluk Bone Sebelah Barat: Kabupaten Bantaeng Daerah perbukitan di Kabupaten Bulukumba terbentang mulai dari Barat ke Utara dengan ketinggian 100 sampai dengan diatas 500 meter dari permukaan laut meliputi bagian dari Kecamatan Kindang, Kecamatan Bulukumba dan Kecamatan Rilau Ale.

Kabupaten Bulukumba mempunyai suhu rata-rata berkisar antara 23,82 °C–27,68 °C. Suhu pada kisaran ini sangat cocok untuk pertanian tanaman pangan dan tanaman perkebunan. Berdasarkan analisis Smith–Ferguson (tipe iklim diukur menurut bulan basah dan bulan kering) maka klasifikasi iklim di Kabupaten Bulukumba termasuk iklim lembab atau agak basah. Kabupaten

Bulukumba berada disektor timur, musim gadu antara Oktober–Maret dan musim semi rendengan antara April–September. Terdapat 8 buah stasiun penakar hujan yang tersebar dibeberapa kecamatan, yakni : stasiun Bettu, stasiun Bontonyeleng, stasiun Kajang, Stasiun Batukaropa, stasiun Tanah Kongkong, stasiun Bontobahari, stasiun Bulo-bulo dan stasiun Herlang. Daerah dengan curah hujan tertinggi terdapat pada wilayah barat laut dan timur, sedangkan tengah memiliki curah hujan sedang, sedangkan pada bagian selatan curah hujannya rendah. Curah hujan antara 800-1000 mm/tahun, meliputi Kecamatan Ujungbulu, sebagian Gantarang, sebagian Ujungloe, dan sebagian besar Bontobahari. Curah hujan antara 1000–1500 mm/tahun, meliputi sebagian Gantarang, sebagian Rilau Ale, Sebagian Ujungloe, Sebagian Kindang, Sebagian Bulukumpa, Sebagian Bontotiro, Sebagian Herlang, dan Kecamatan Kajang. Curah hujandi atas 2000 mm/tahun meliputi Kecamatan Kindang, Kecamatan Rilau Ale, Kecamatan Bulukumpa, dan Helang. Sungai di Kabupaten Bulukumba ada 32 aliran yang terdiri sungai besar dan sungai kecil. Sungai-sungai ini mencapai panjang 603,50 km dan yang terpanjang adalah sungai Sangkala 65,3052 km, sedangkan yang terpendek adalah sungai Biroro yakni 1,50 km. Sungaisungai ini mampu mengairi lahan sawah seluas 23.365Ha.

2. Profil Dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Penggabungan dua instansi yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bulukumba dengan Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bulukumba yang berdiri pada tanggal 13 maret 1978. Kedua instansi ini adalah penyelenggara Pembangunan di Bidang Pendidikan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan pendidikan dasar yang bertanggung jawab pada Sekretariat Daerah . Kantor

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan bertanggung jawab pada Kantor Wilayah Depdikbud Provinsi.

Pembentukan Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bulukumba berdasarkan Kepmen Dikbud Nomor .0713/10/1983, tanggal 14 maret 1983 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Depdikbud. Seiring dengan berjalannya waktu dengan diberlakukannya Otonomi Daerah, maka Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bulukumba bergabung menjadi satu instansi dengan nama Dinas Pendidikan Kab. Bulukumba berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah Kab. Bulukumba.

Pada tahun 2009 Dinas Pendidikan Kab. Bulukumba berganti nama menjadi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sampai tahun 2016 sesuai Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bulukumba.

Pada Tahun 2017 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga selanjutnya berganti nama menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 tahun 2016 yang menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah pertama dan Kebudayaan yang bertanggung jawab pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bertanggungjawab pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dibawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22/1999 yang diperbaharui Undang-Undang Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah mengartikan desentralisasi sebagai penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom, maka skala prioritas tujuan desentralisasi membawa

konsekuensi terhadap struktur dan proses pemerintahan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 8/2003 memberikan keluasaan kepada kepala daerah dalam menetapkan kebutuhan organisasi sesuai dengan penilaian daerah masing-masing.

Berdasarkan kewenangan itu, pemerintah Kabupaten Bulukumba menetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2000 dan Peraturan Daerah nomor 14 tahun 2016 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba. Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang pendidikan. Untuk mewujudkan visi dan misi, maka dirumuskan tujuan yang harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang harus dicapai di masa mendatang. Tujuan strategis yang ingin dicapai yaitu agar sumber daya yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba dapat dimanfaatkan secara sinergis dalam mewujudkan tujuan pendidikan. Kenyataan yang ada fasilitas pendukung pekerjaan masih kurang, pendidikan dan pengalaman sumber daya manusia (SDM) masih kurang, hal ini dapat terlihat dalam hal pemberian layanan dan hampir terjadi pada setiap sub kurangnya informasi atau data jika diperlukan, hal lain kedisiplinan pegawai masih rendah dan kurangnya tingkat kesadaran bagi mereka untuk mengembangkan diri serta motivasi dan loyalitas yang rendah, sehingga dengan sendiri belum tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.

➤ **Visi dan Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**

a) **Visi**

Terwujudnya pendidikan yang bermutu dan mandiri guna tersedianya sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia.

b) **Misi**

Dalam rangka mewujudkan visi di atas, misi yang akan diemban oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba adalah :

1. Meningkatkan profesionalisme SDM Kependidikan yang berbudaya, religius dan berorientasi pada pengembangan Bulukumba sebagai pusat pelayanan;
2. Menerapkan metode dan teknik pembelajaran yang dapat mengembangkan aspek kognitif, afektif dan psikomotorik secara proporsional;
3. Menyelenggarakan pendidikan jalur sekolah, pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
4. Meningkatkan mutu lulusan yang mampu melanjutkan pendidikan dan memasuki pasar kerja;
5. Meningkatkan partisipasi belajar melalui jalur sekolah dan luar sekolah dalam rangka penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.

Misi ke satu menggambarkan dimensi input untuk mewujudkan visi pendidikan yang bermutu yaitu pendidikan yang memiliki keunggulan dalam proses pembelajaran;

Misi ke dua dan ketiga menggambarkan dimensi proses untuk mewujudkan visi pendidikan yang bermutu dan mandiri

Misi keempat dan kelima menggambarkan dimensi output untuk mewujudkan visi tersedianya sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif yang dilandasi dengan keimanan, ketaqwaan dan akhlak yang mulia.

B. Hasil Penelitian

Untuk dibagikan hasil penelitian, dijelaskan terkait hasil dari data yang sudah didapat di lapangan baik itu melalui teknik wawancara, maupun melalui bahan tertulis dan juga observasi yang dilakukan pada saat penelitian yang mencakup evaluasi kebijakan publik dalam pembelajaran berbasis *daring* pada masa pandemi *COVID 19* di Bulukumba.

1. Evaluasi kebijakan publik dalam pembelajaran berbasis *daring* pada masa pandemi *COVID 19* di Bulukumba

Kebijakan publik adalah salah satu kebijakan atau aktivitas pemerintah yang mana untuk memecahkan suatu masalah yang terjadi pada masyarakat. Jadi ditepkannya konsep ini untuk merespon permasalahan yang terjadi yang mengganggu masyarakat akan kesehatan dan keselamatan hidup akibat adanya *COVID 19*.

Keberhasilan dari kebijakan publik dalam mengatasi *COVID 19* di kabupaten Bulukumba yang akan dianalisa oleh peneliti dengan menggunakan teori prinsip evaluasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Dunn (2003), pada penelitian ini dapat dilihat dari 3 prinsip evaluasi kebijakan publik diantaranya yaitu : (1) Evaluasi formal , (2) Evaluasi semu, (3) Evaluasi teori keputusan. Adapun hasil penelitian terkait evaluasi kebijakan publik pada pembelajaran berbasis *daring* pada masa pandemi *COVID 19* di Bulukumba sebagai berikut :

a. Evaluasi Formal

Evaluasi formal adalah suatu pendekatan evaluasi yang mana telah menggunakan metode agar mendapatkan hasil informasi yang akurat dan valid terkait hasil kebijakan yang berdasarkan sasaran suatu program kebijakan yang sebelumnya telah ditetapkan secara formal oleh pembuat

kebijakan. Adapun surat edaran terkait pembelajaran berbasis *daring* sesuai kesepakatan bersama untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Harus diadakannya evaluasi formal dalam kebijakan guna untuk memperkuat kebijakan agar terlaksana dengan baik.

Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang dikemukakan oleh Anugrah oetsman, mengatakan:

“Mengenai kebijakan publik sistemnya itu dilakukan dengan sebagaimana mestinya sesuai aturan dan juga keputusan atasan yang ada, karena sesuai dengan kebijakan kita harus menerapkan pembelajaran berbasis *daring* dikarenakan keterbatasan disaat kondisi seperti ini” (Wawancara dengan AO, 01 Oktober 2023)

Sesuai hasil wawancara yang di kemukakan peneliti bahwasanya bentuk dari evaluasi formal yang telah ada dokumen sebagai sasaran kebijakan hal ini diikuti dan diterapkan.

Kabid pembinaan ketenagaan Kabupaten Bulukumba yang bernama Bustang juga menambahkan bahwa:

“kami selaku dinas pendidikan dan kebudayaan di daerah ini terus memantau penerapan pembelajaran *daring* di setiap-tiap sekolah apakah sudah menjalankan sesuai dokumen atau edaran yang ada, karena sebelum di terapkan kita sudah memperingati agar tidak melanggar edaran dari pusat yang telah ada dan selalu konsisten dalam melaksanakan guna menghindari *COVID 19*” (Wawancara dengan BS, 01 Oktober 2023)

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dari evaluasi formal yang memantau setiap kegiatan sekolah agar tidak melenceng dari edaran yang ada.

Peneliti juga melakukan wawancara kepada salah satu guru yang bernama A. Rahmawati Hamsah yang mengatakan, bahwa:

“untuk evaluasi formal pada kebijakan publik di daerah ini kita sebagai

guru hanya berpatokan dengan peraturan dan ketetapan yang telah ditetapkan oleh pihak pusat dan dinas, hal ini kita hanya melaksanakan sesuai rute agar tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan” (Wawancara dengan ARH, 03 Oktober 2023)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, disimpulkan bahwa edaran keputusan dilakukan pihak sekolah sesuai dengan rute yang ada pada poin-poin pada edaran.

Dari hasil wawancara di atas dan hasil observasi di lapangan, peneliti dapat mengemukakan bahwa evaluasi kebijakan publik pada pembelajaran *daring* pada masa pandemi *COVID 19* di Bulukumba dalam prinsip evaluasi formal dapat disimpulkan bahwasanya bentuk dari evaluasi formal yang telah ada dokumen sebagai sasaran kebijakan hal ini diikuti dan diterapkan. Dari evaluasi formal yang memantau setiap kegiatan sekolah agar tidak melenceng dari edaran yang ada, edaran keputusan dilakukan pihak sekolah sesuai dengan rute yang ada pada poin-poin pada edaran.

b. Evaluasi Semu

Evaluasi semu adalah penilaian berdasarkan parameter tertentu yang secara umum disepakati (*self evident*) oleh masyarakat dan tokoh-tokoh di daerah Bulukumba dan tidak terjadinya kontroversial (*uncontroversial*) antar tokoh dan masyarakat. Hasil evaluasinya mudah diterima oleh publik dan tidak terlalu rumit (*complicated*). Melakukan penilaian dengan metode yang menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid terkait hasil-hasil kebijakan tanpa melihat manfaat dan hasil kebijakan tersebut pada individu, kelompok maupun masyarakat. Dalam kebijakan publik yang ada setiap *stakeholder* sama-sama menerapkan dengan baik sesuai aturan yang ada.

Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Syahrul Alam selaku kasubag umum yang mengatakan bahwa:

“secara pelaksanaan pembelajaran *daring* sudah dilaksanakan sekolah akan tetapi masih ada sedikit kendala terkait pribadi siswa yang kekurangan ekonomi sulit untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam pembelajaran *daring* yaitu Hp karena tidak semua siswa memiliki hp” (Wawancara dengan SA, 01 Oktober 2023)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasanya masih ada kendala dari hal pribadi siswa yang tidak semua memiliki hp sedangkan hp adalah objek yang dibutuhkan pada saat pembelajaran *daring*.

Hal tersebut didukung dari pernyataan Butsang yang mengemukakan bahwa:

“betul tidak semua kebijakan berjalan dengan mulus pasti adalah kendala sedikit apalagi menyangkut hal pribadi pembelajaran *daring* ini tidak berjalan begitu mulus karena salah satunya itu terkendala di hp sedangkan pembelajaran *daring* membutuhkan hp” (Wawancara dengan BS, 01 Oktober 2023)

Dari hasil wawancara yang diatas peneliti mengemukakan bahwasanya memang ada kendala sedikit mengenai hp yang sedangkan itu objek terpenting untuk mendukung lancarnya penerapan pembelajaran *daring*.

Salah satu guru juga menambahkan yang bernama A. Aulia Novryani yang mengatakan bahwa:

“secara keseluruhan dalam proses pembelajaran *daring* belum diperoleh hasil yang maksimal disebabkan banyak peserta yang masih kesulitan dengan daya dukung teknologi informasi masih terbatas. Disamping itu beberapa orangtua mengalami kesulitan dalam mendampingi kegiatan belajar anak, karena dilakukan secara tertulis maupun praktik melalui audio visual” (Wawancara dengan AAN, 03 Oktober 2023)

Hasil wawancara diatas dapat dikemukakan bahwasanya keseluruhan masih belum begitu maksimal dalam pelaksanaannya diakrekan beberapa hal yang diantaranya orangtua yang kesulitan mendampingi anak.

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi di lapangan penulis

mengemukakan bahwa evaluasi semu dalam evaluasi kebijakan publik dalam pembelajaran *daring* pada masa pandemi *COVID 19* di Bulukumba bahwasanya masih ada kendala dari hal pribadi siswa yang tidak semua memiliki hp sedangkan hp adalah objek yang dibutuhkan pada saat pembelajaran *daring*, memang ada kendala sedikit mengenai hp yang sedangkan itu objek terpenting untuk mendukung lancarnya penerapan pembelajaran *daring*. Serta keseluruhan masih belum begitu maksimal dalam pelaksanaannya diakibatkan beberapa hal yang diantaranya orangtua yang kesulitan mendampingi anak.

c. Evaluasi Teori Keputusan

Evaluasi teori keputusan ini dilakukan guna menilai kebijakan yang menyangkut banyak pihak (*stakeholder*) karena dalam pengambilan keputusan sulit dilakukan dikarenakan banyak statment atau pendapat yang berbeda sehingga bersitegang perbedaan pendapat dalam penentuan kebijakan pembelajaran *daring* di Bulukumba.

Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Syahrul Alam yang mengatakan bahwa:

“pengambilan keputusan mengenai pembelajaran *daring* dilakukan melalui kesepakatan antara pihak sekolah dengan orangtua siswa yang memperhatikan kondisi yang terjadi dan urgensinya sehingga dilakukan pembelajaran *daring*” (Wawancara dengan SA, 01 Oktober 2023)

Wawancara diatas dapat dikemukakan bahwa pengambilan keputusan melalui kesepakatan bersama antara pihak sekolah dan orangtua siswa.

Didukung dari pernyataan Anugrah Oetsman mengatakan, bahwa:

“keputusan ini diambil dari hasil rapat dan pertemuan yang diadakan antara pihak sekolah dan orangtua siswa, kondisi ini tidak berjalan selamanya hanya untuk sementara jadi setelah pandemi sudah tidka ada dan selesai proses pembelajaran kembali seperti semula yaitu dengan tatap muka di sekolah” (Wawancara dengan AO, 01 Oktober 2023)

Hasil wawancara diatas disimpulkan yaitu keputusan yang dilakukan dengan pertemua dari berbagai *stakeholder* yang dilaksanakan untuk sementara dan nantinya akan kembali normal seperti semula.

Wawancara juga dilakukan dengan guru yang bernama A. Aulia Novryani yang mengatakan, bahwa:

“dari keputusan yang ada dan diterapkan untuk sementara kita menyetujui tetapi kita tidak bisa pungkiri kualitas pembelajaran *daring* itu akan menjadi barometer kualitas pendidikan siswa sekolah pada umumnya, tetapi ini hanya sementara selama pandemi ada dan segera kembali ke semula setelah sudah tidak ada lagi pandemi” (Wawancara dengan AAN, 03 Oktober 2023)

Hasil wawancara diatas dikemukakan bahwa tidak dapat dipungkiri kualitas pembelajaran *daring* akan jadi barometer pendidikan siswa .

Peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu orangtua siswa yang bernama Suriani, yang mengatakan bahwa:

“kita sebagai orangtua hanya bisa membimbing anak-anak kita selama pandemi hilang karena mau gimana lagi satu sisi anak harus terus menuntun ilmu sedangkan dengan adanya pandemi keterbatasan anak melakukan kegiatan di sekolah di batasi dengan jalan keluar dengan melakukan pembelajaran *daring*” (Wawancara dengan SR, 04 Oktober 2023)

Dari hasil wawancara diatas peneliti mengambil keputusan yang mana orang tua akan selalu mendampingi anak-anaknya dalam mengikuti proses pembelajaran *daring* selama pandemi masih ada.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan hasil observasi peneliti dapat mengemukakan bahwa evaluasi kebijakan publik dalam pembelajaran *daring* pada masa pandemi *COVID 19* di Bulukumba dalam prinsip evaluasi teori keputusan bahwa pengambilan keputusan melalui kesepakatan bersama

antara pihak sekolah dan orangtua siswa. Yang mana keputusan yang dilakukan dengan pertemuan dari berbagai *stakeholder* yang dilaksanakan untuk sementara dan nantinya akan kembali normal seperti semula. Dan tidak dapat dipungkiri kualitas pembelajaran *daring* akan jadi barometer pendidikan siswa dan orang tua akan selalu mendampingi anak-anaknya dalam mengikuti proses pembelajaran *daring* selama pandemi masih ada.

2. Faktor Yang Mempengaruhi kualitas Evaluasi Kebijakan Publik Dalam Pembelajaran *Daring* Pada Masa Pandemi COVID 19 di Bulukumba

a. Faktor Pendukung

Kemampuan guru dalam mentransfer ilmu sudah baik dalam pembelajaran *daring* yang hanya belajar melalui hp, dan gigihnya orangtua selalu mendampingi anak dalam mengikuti pelajaran, dan pengawasan dinas yang selalu ada memperhatikan proses berlangsungnya atau berjalannya pembelajaran *daring*.

b. Faktor Penghambat

Dalam pengambilan keputusan yang awalnya sulit dilakukan pembelajaran *daring* dikarenakan beberapa hal akan tetapi demi keberlangsungan proses belajar siswa terus berjalan disetujuinya oleh berbagai stakeholder, dan dalam proses pembelajaran kemampuan siswa dalam menerima beberapa materi secara *daring* belum maksimal, selain itu masih ditemui keterbatasan orangtua dalam mendampingi dan hal memenuhi kebutuhan objek dalam pembelajaran *daring* sulit karena tidak semua memiliki perekonomian yang cukup untuk memenuhi kebutuhan ialah hp.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Evaluasi Formal

Dalam prinsip evaluasi formal dapat disimpulkan bahwasanya bentuk dari evaluasi formal yang telah ada dokumen sebagai sasaran kebijakan hal ini diikuti dan diterapkan. Dari evaluasi formal yang memantau setiap kegiatan sekolah agar tidak melenceng dari edaran yang ada, edaran keputusan dilakukan pihak sekolah sesuai dengan rute yang ada pada poin-poin pada edaran.

2. Evaluasi Semu

Dalam prinsip evaluasi semu dalam evaluasi kebijakan publik dalam pembelajaran *daring* pada masa pandemi *COVID 19* di Bulukumba bahwasanya masih ada kendala dari hal pribadi siswa yang tidak semua memiliki hp sedangkan hp adalah objek yang dibutuhkan pada saat pembelajaran *daring*, memang ada kendala sedikit mengenai hp yang sedangkan itu objek terpenting untuk mendukung lancarnya penerapan pembelajaran *daring*. Serta keseluruhan masih belum begitu maksimal dalam pelaksanaannya diakarenakan beberapa hal yang diantaranya orangtua yang kesulitan mendampingi anak.

3. Evaluasi Teori Keputusan

Dalam prinsip evaluasi teori keputusan bahwa pengambilan keputusan melalui kesepakatan bersama antara pihak sekolah dan orangtua siswa. Yang mana keputusan yang dilakukan dengan pertemuan dari berbagai *stakeholder* yang dilaksanakan untuk sementara dan nantinya akan kembali normal seperti semula. Dan tidak dapat dipungkiri kualitas pembelajaran *daring*

akan jadi barometer pendidikan siswa dan orang tua akan selalu mendampingi anak-anaknya dalam mengikuti proses pembelajaran *daring* selama pandemi masih ada.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan yang dapat peneliti simpulkan yaitu:

- 1) Evaluasi formal : Bentuk evaluasi formal yang dilakukan ialah melakukan pengedaran dokumen sebagai bentuk himbauan atas dari penetapan dilberlakukannya pembelajaran berbasis *daring* yang selalu di pantau dengan baik.
- 2) Evaluasi semu : Bentuk dari evaluasi semu ialah yang mana masih ada sedikit kendala yang menjadi kesulitan untuk mengikuti pembelajaran berbasis *daring*, dan orang tua siswa masih kesulitan dalam mendampingi anaknya untuk mengitkui pembelajaran berbasis *daring*.
- 3) Evaluasi teori keputusan : Bentuk dari evaluasi teori keputusan itu melakukan pertemuan dengan beberapa *stakeholder* untuk menetapkan diselenggarakannya pembelajaran berbasis *daring*.
- 4) Faktor pendukung dan penghambat : kemampuan menyampaikan ilmu sudah berjalan dengan sesuai aturan, dan ada kendala seperti hp tidak semua memilikinya dan keterbatasan orangtua mendampingi anaknya mengikuti pelajaran secara *daring*.

B. Saran

Upaya yang dilakukan agar kebijakan publik terkait pembelajaran *daring* berjalan dengan tanpa kendala , adapun beberapa saran dari peneliti yaitu :

- 1) Pihak pemerintah : agar kiranya sigap dalam mengatasi kendala yang dikeluhkan bagi yang melaksanakan atau terlibat dalam pembelajaran *daring*.

- 2) Pihak guru : supaya terus membentuk pembelajaran yang sesuai siswa inginkan agar tidak ada kendala sedikitpun dan agar kiranya tidak mempersulit siswa.
- 3) Pihak orangtua : jangan pernah menyerah dalam mendampingi anak mengikuti proses pembelajaran agar pembelajarannya berjalan sebagaimana mestinya.



DAFTAR PUSTAKA

- Ambarasari, yuni, r. (2021). Evaluasi pembelajaran daring selama pandemi covid-19 di kecamatan bulukerto wonigiri. *Jurnal ilmiah mitra swara genesha*, 8(1), 28–35.
- Atiqurrahman, m. (2021). *Implementasi kebijakan pembelajaran online dalam upaya efektivitas belajar mahasiswa di masa pandemi covid-19*. Universitas islam negeri maulana malik ibrahim malang.
- Dikson silitonga. (2018). Evaluasi implementasi kebijakan publik (studi kasus: evaluasi implementasi kebijakan un sd di kota madya jakarta pusat). *Administrasi publik*, 21(july), 1–23.
- Latifah, u. (2020). *Kebijakan penyelenggaraan pendidikan di masa pandemi covid 19 dan relevansinya dengan pola asuh orang tua menurut zakiah daradjat*. Institut agama islam negeri (iain) ponorogo.
- Lely nurmaya, a. G., ayu lestari, a., & melani, f. (2021). Analisis evaluasi pembelajaran daring (online) sekolah dasar selama pandemi covid 19. *Jkpd jurnal kajian pendidikan dasar*, 6(1), 80–85. <https://jurnal.unismuh.ac.id/index.php/jkpd/article/view/4745>
- Putra, r. P. (2012). *Evaluasi kebijakan trans pakuan di kota bogor*. Universitas indonesia.
- Suhendro, e. (2020). Strategi pembelajaran pendidikan anak usia dini di masa pandemi covid-19. *Golden age: jurnal ilmiah tumbuh kembang anak usia dini*, 5(3), 133–140. <https://doi.org/10.14421/jga.2020.53-05>
- Tamami, f. (2021). Evaluasi pembelajaran daring di masa pandemi. *Jurnal pendidikan indonesia*, 2(8), 1332–1352. <https://doi.org/10.36418/japendi.v2i8.250>
- Wiryan, i. W. (2020). Kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi virus corona disease 2019 (covid-19) di indonesia. *Prosiding seminar nasional webinar nasional universitas mahasaraswati denpasar, 2019*(6), 179–188. <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/webinaradat/article/view/1180/1012>
- ambarasari, yuni, r. (2021). Evaluasi pembelajaran daring selama pandemi covid-

19 di kecamatan bulukerto wonigiri. *Jurnal ilmiah mitra swara genesha*, 8(1),28–35.

Atiqurrahman, m. (2021). *Implementasi kebijakan pembelajaran online dalam upaya efektivitas belajar mahasiswa di masa pandemi covid-19*. Universitas islam negeri maulana malik ibrahim malang.

Dikson silitonga. (2018). Evaluasi implementasi kebijakan publik (studi kasus: evaluasi implementasi kebijakan un sd di kota madya jakarta pusat). *Administrasi publik*, 21(july), 1–23.

Latifah, u. (2020). *Kebijakan penyelenggaraan pendidikan di masa pandemi covid 19 dan relevansinya dengan pola asuh orang tua menurut zakiah daradjat*. Institut agama islam negeri (iain) ponorogo.

Lely nurmaya, a. G., ayu lestari, a., & melani, f. (2021). Analisis evaluasi pembelajaran daring (online) sekolah dasar selama pandemi covid 19. *Jkpd) jurnal kajian pendidikan dasar*, 6(1), 80–85. <https://jurnal.unismuh.ac.id/index.php/jkpd/article/view/4745>

Putra, r. P. (2012). *Evaluasi kebijakan trans pakuan di kota bogor*. Universitas indonesia.

Suhendro, e. (2020). Strategi pembelajaran pendidikan anak usia dini di masa pandemi covid-19. *Golden age: jurnal ilmiah tumbuh kembang anak usia dini*, 5(3), 133–140. <https://doi.org/10.14421/jga.2020.53-05>

Tamami, f. (2021). Evaluasi pembelajaran daring di masa pandemi. *Jurnal pendidikan indonesia*, 2(8), 1332–1352. <https://doi.org/10.36418/japendi.v2i8.250>

Wiryawan, i. W. (2020). Kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi virus corona disease 2019 (covid-19) di indonesia. *Prosiding seminar nasional webinar nasional universitas mahasaraswati denpasar, 2019*(6), 179–188. <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/webinaradat/article/view/1180/1012>

L

A

M

P

I

R

A

N











**PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 41, Bulukumba Telp. (0413) 81054

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800/6707/Dikbud-01/X/2023

Menindaklanjuti surat Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Nomor: 558/DPMPTSPTK/X/2023 tanggal 3 Oktober 2023 perihal Surat Izin Penelitian, Sehubungan dengan hal tersebut, kami menerangkan bahwa :

Nama : Andi Agung Triyatma
Nomor Pokok : 105641100217
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang : S-1
Institusi : Universitas Muhammadiyah Makassar
Tempat, Tgl. Lahir : Bulukumba, 19 Juli 1999
Alamat : Tanah Baru Bulukumba
Jenis Penelitian : Kualitatif

Telah melakukan Penelitian pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka penyusunan SKRIPSI dengan judul *Evaluasi Kebijakan Publik dalam Pembelajaran Berbasis Daring pada Masa Pandemi Covid 19 di Kab. Bulukumba* yang berlangsung pada tanggal 28 September sampai dengan 28 Oktober 2023.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bulukumba, 30 Oktober 2023

Kepala Dinas

YANDI BUYUNG SAPUTRA, S.STP., M.M.

Pangkat: Pembina Tk. 1

NIP : 198111102000121002

Tembusan:

1. Bupati Bulukumba;
2. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kab. Bulukumba;
3. Mahasiswa yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
(D P M P T S P T K)

Jl. Kenari No. 13 Telp. (0413) 84241 Fax. (0413) 85060 Bulukumba 92511

SURAT IZIN PENELITIAN
NOMOR : 558/DPMTSPTK/IP/X/2023

Berdasarkan Surat Rekomendasi Teknis dari KESBANGPOL dengan Nomor 074/934/Bakesbangpol/X/2023 tanggal 2 Oktober 2023, Perihal Rekomendasi Izin Penelitian maka yang tersebut dibawah ini :

Nama Lengkap : **Andi agung triyatma**
Nomor Pokok : **105641100217**
Program Studi : **Ilmu pemerintahan**
Jenjang : **Mahasiswa S1**
Institusi : **Universitas Muhammadiyah Makassar**
Tempat/Tanggal Lahir : **Bulukumba, 1999-07-19**
Alamat : **Tanah beru**

Jenis Penelitian : **Kualitatif**
Judul Penelitian : **Evaluasi kebijakan publik dalam pembelajaran berbasis daring pada masa pandemi covid 19 di kabupaten bulukumba**

Lokasi Penelitian : **Bulukumba**
Pendamping : **Ahmad Harakan, S.IP., M.HI**
Instansi Penelitian : **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bulukumba**
Lama Penelitian : **tanggal 28 September 2023 s/d 28 November 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami mengizinkan yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mematuhi semua Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat - istiadat yang berlaku pada masyarakat setempat;
2. Tidak mengganggu keamanan/ketertiban masyarakat setempat
3. Melaporkan hasil pelaksanaan penelitian/pengambilan data serta menyerahkan 1(satu) eksampir hasilnya kepada Bupati Bulukumba Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Bulukumba;
4. Surat izin ini akan dicabut atau dianggap tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut di atas, atau sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan kegiatan penelitian/pengumpulan data dimaksud belum selesai.

Dikeluarkan di : **Bulukumba**
Pada Tanggal : **03 Oktober 2023**



Kepala Dinas DPMTSPTK
Drs. Hj. Umrah Aswani, MM
Pangkat : **Pembina Utama Muda-IV/c**
Nip. : **19670304 199303 2 010**



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 2551/05/C.4-VIII/IX/1444/2023

10 Rabiul awal 1445 H

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

25 September 2023 M

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. SUL-SEL

Ca. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Prov. SUL-SEL

di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 2493/FSP/A.6-VIII/IX/1445 H/2023 M tanggal 25 September 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : ANDLAGUNG TRIYATMA

No. Stambuk : 10564 1100217

Fakultas : Fakultas Sosial dan Politik

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Evaluasi Kebijakan Publik Pembelajaran Berbasis Daring pada Masa Pandemi Covid 19 di Kabupaten Bulukumba"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 28 September 2023 s/d 28 November 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,



Dr. Muh. Arief Muhsin, M.Pd

NBM 1127761



Universitas
Muhammadiyah
Makassar
Integrity - Professionalism - Entrepreneurship

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Faculty of Social and Political Sciences

Menara Iqra Lanrai 5 - Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90221
Telp: (0411) 866 972 Fax: (0411) 865 588
Official Email : fosp@unismuh.ac.id
Official Web : <https://fosp.unismuh.ac.id>

Nomor : 2493/FSP/A.6-VIII/IX/1445 H/2023 M
Lamp. : 1 (satu) Eksemplar
Hal : **Pengantar Penelitian**

Kepada Yth.
Bapak Rektor, Cq. Lembaga Penelitian dan
Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Unismuh
Di -
Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian mahasiswa untuk melengkapi data dalam rangka Penulisan Skripsi, maka diharapkan kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan Pengantar Penelitian kepada :

Nama Mahasiswa : Andi Agung Triyatma
St a m b u k : 105641100217
J u r u s a n : Ilmu Pemerintahan
Lokasi Penelitian : Di Dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba
Judul Skripsi : ***"Evaluasi Kebijakan Publik di Pembelajaran Berbasis Daring pada Masa Pandemi Covid 19 di Kabupaten Bulukumba"***

Demikian Pengantar Penelitian ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, diucapkan banyak terima kasih.

Jazakumullahu Khaeran Katziraa
Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 25 September 2023

Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan


Akhmad Harahan, S.IP., M.HI
NBM: 4207163



Kemajuan Untuk Bangsa dan Ummat Manusia
Progress for the Nation and Humankind

Ilmu Administrasi Negara - Ilmu Pemerintahan - Ilmu Komunikasi
Public Administration - Government Studies - Communication Science



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp. (0411) 866972,881593, Fax. (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Andi Agung Triyatma

Nim : 105641100217

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9 %	10 %
2	Bab 2	25 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	10 %	10 %
5	Bab 5	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 16 April 2024

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Nurhuda Pratomo, M.I.P
NBM. 964 591

Andi agung triyatma 105641100217 BAB I

ORIGINALITY REPORT

9%	8%	6%	2%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	3%
2	inisiator.com Internet Source	2%
3	Fathiya Shafa Rahmadina, Feby Shafa Rahmadina, Masni Erika Firmiana. "BENTUK DUKUNGAN ORANG TUA PADA ANAK USIA DINI (AUD) SELAMA BELAJAR DARI RUMAH (BDR)", Jurnal Anak Usia Dini Holistik Integratif (AUDHI), 2021 Publication	2%
4	eprints.unm.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On

Andi agung triyatma 105641100217 BAB II

ORIGINALITY REPORT

25% SIMILARITY INDEX	28% INTERNET SOURCES	7% PUBLICATIONS	15% STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	------------------------------

PRIMARY SOURCES

1	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	5%
2	admin.ebimta.com Internet Source	4%
3	repository.ub.ac.id Internet Source	4%
4	id.123dok.com Internet Source	2%
5	ibn.e-journal.id Internet Source	2%
6	lib.ui.ac.id Internet Source	2%
7	sulsel.sehat.news Internet Source	2%
8	eprints.uny.ac.id Internet Source	2%
9	indonesia.go.id Internet Source	2%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%

ORIGINALITY REPORT

10%
SIMILARITY INDEX

12%
INTERNET SOURCES

9%
PUBLICATIONS

7%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- | | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | Gracelia Christi Sopamena, Maylen K Petra Kambuaya, Rama Soyan Arunglamba. "PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH DAN AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP PENGGUNAAN INFORMASI KEUANGAN DAERAH (Studi Pada Kabupaten Keerom)", <i>Jurnal Akuntansi, Audit, dan Aset</i> , 2021
Publication | 2% |
| 2 | journal.unpas.ac.id
Internet Source | 2% |
| 3 | Aulia Al Qori Hadistiyah, Rio Johan Putra. "Efektivitas Pelaporan Pajak Di Indonesia", <i>Owner</i> , 2022
Publication | 2% |
| 4 | thefikkar.blogspot.com
Internet Source | 2% |
| 5 | docplayer.info
Internet Source | 2% |

Andi agung triyatma 105641100217 BAB IV

ORIGINALITY REPORT

10% SIMILARITY INDEX	13% INTERNET SOURCES	4% PUBLICATIONS	4% STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES

1	journal.unismuh.ac.id Internet Source	2%
2	empatlawangkab.go.id Internet Source	2%
3	journal.umy.ac.id Internet Source	2%
4	journal.uin-alauddin.ac.id Internet Source	2%
5	Nursinah Amir, Metusalach Metusalach, Fahrul Fahrul. "Mutu dan Keamanan Pangan Produk Ikan Asap di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan", Agrikan: Jurnal Agribisnis Perikanan, 2018 Publication	2%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On

Andi agung triyatma 105641100217 BAB V

ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX

5%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

docobook.com

Internet Source

5%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%



RIWAYAT HIDUP

Andi Agung Triyatma. Lahir di Bulukumba 19 Juli 1999. Anak ke tiga dari empat bersaudara, pasangan Ayahanda Andi Muhammad Basri dan Ibunda Hadawiyah,S.Pd.SD. Penulis memulai Pendidikan pada tahun 2005 di SD Negeri 262 Tanah Lemo dan tamat pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan Pendidikan di SMP Negeri 32 Bulukumba dan lulus pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan Pendidikan SMA Negeri 3 Bulukumba dan lulus pada tahun 2017. Selanjutnya pada tahun 2017, penulis melanjutkan Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan mengambil Program Studi Ilmu Pemerintahan dan meraih gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada tahun 2024 dengan Menyusun Skripsi berjudul “Evaluasi kebijakan publik dalam pembelajaran berbasis *daring* pada masa pandemi *covid 19* di bulukumba”.